

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN  
2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

**B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 37 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan OPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan OPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD	
	2.1	Iktisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan OPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan OPD
		3.1.1 LRA
		3.1.2 Neraca
		3.1.3 LO
		3.1.4 LPE
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

**A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

## a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp 1.543.956.730,00 atau 103,41 % dari anggaran sebesar Rp 1.493.096.000,00 dan mengalami penurunan sebesar 28,20 % .Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (audited) (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.493.096.000,00	1.543.956.730,00	50.860.730,00	103, 41%	2.150.314.033,00

## b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp 4.773.980.765,00 dari anggaran sebesar Rp 4.967.700.000,00 atau mencapai 96,10 %. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp 5.477.216.463,00 realisasinya mengalami kenaikan sebesar 2,30 %.

## 1. Realisasi Belanja Per Akun

Rician realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	%
<b>B. BELANJA</b>			
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	2.965.950.000,00	2.798.820.446,00	94,37
2. Belanja Barang	1.984.572.000,00	1.958.107.619,00	98,67
3. Belanja Hibah	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>4.950.522.000,00</b>	<b>4.756.928.065,00</b>	<b>96,09</b>
Belanja Modal			
1. Belanja Modal Tanah	17.178.000,00	17.052.700,00	99,27
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>17.178.000,00</b>	<b>17.052.700,00</b>	<b>99,27</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.967.700.000,00</b>	<b>4.773.980.765,00</b>	<b>96,10</b>

## **B. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2023 antara lain :

### **a. Pendapatan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan tahun anggaran 2023 sebagai berikut::

1. Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah tidak menemui hambatan dan kendala karena terealisasi sebesar Rp. 272.340.730,00 dari anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 (136,17%) atau melampaui target.
2. Pendapatan Retribusi Pegawai dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp. 1.271.616.000,00 dari target sebesar Rp. 1.293.096.000,00 (98,34%) atau masih kurang 1,66%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pendapatan Retribusi Pegawai dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah karena wajib retribusi yaitu PT. Solusi Tunas Pratama dan PT. Sarana Inti Persada menanggunghkan pembayaran retribusi sampai dengan Bulan Januari 2024.

### **b. Belanja**

Belanja operasi tidak terserap sebesar 3,91% dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

#### **a) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai secara keseluruhan tidak terserap sebesar 5,63%. Sisa anggaran terbesar pada rekening belanja tunjangan fungsional yaitu sebesar 45,46% karena pada rekening tersebut sudah dianggarkan berdasarkan besaran tunjangan yang seharusnya diterimakan, namun sampai dengan akhir tahun anggaran berakhir besaran tunjangan fungsional masih sama dan belum ada perubahan.

Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 36,55% disebabkan target pendapatan hanya terealisasi sebesar 98,34% sehingga insentifnya hanya bisa direalisasikan sebesar 70%.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa secara keseluruhan tidak terserap sebesar 1,33%.

Deviasi pada realisasi belanja barang secara umum terjadi karena adanya selisih harga penawaran.

Sisa anggaran belanja jasa terbesar pada belanja jasa kantor sebesar 2,67%. Belanja jasa kantor yang deviasinya terbesar adalah pada rekening belanja jasa tagihan air yaitu sebesar 14,67%.

c) Belanja Modal

Belanja modal secara keseluruhan tidak terserap sebesar 0,27% merupakan selisih harga penawaran dari penyedia barang. Belanja Modal Tahun ANggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen terdiri dari belanja modal peralatan personal computer berupa hardisk eksternal dan mouse serta belanja modal peralatan studio video dan film berupa drone.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**  
**RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN**  
**PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

**A. Laporan Realisasi Anggaran**

## 1. Pendapatan - LRA

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp 1.493.096.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.543.956.730,00 atau 103,41 % dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	*)Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	1.493.096.000,00	1.543.956.730,00	50.860.730,00	103,41	2.150.314.033,00

Pendapatan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 melampaui target yaitu sebesar 103,41 % dari anggaran dan turun 40,61% dari realisasi Tahun 2022.

a) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.493.096.000,00 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	1.493.096.000,00	1.543.956.730,00	103,41	2.150.314.033,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.493.096.000,00</b>	<b>1.543.956.730,00</b>	<b>103,41</b>	<b>2.150.314.033,00</b>

## 1) Retribusi Daerah

Anggaran

Realisasi

---

 Rp 1.493.096.000,00

---

 Rp 1.543.956.730,00

Retribusi Daerah yang dikelola OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp 1.493.096.000,00 terdiri dari:

Retribusi	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.293.096.000,00	1.271.616.000,00	98,34	1.808.616.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	272.340.730,00	136,17	00,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.493.096.000,00</b>	<b>1.543.956.730,00</b>	<b>103,41</b>	<b>1.808.616.000,00</b>

Pendapatan dari Retribusi terealisasi 103, 41%, mengalami penurunan sebesar 40,61% jika dibandingkan pendapatan Retribusi Tahun 2022 yang sebesar Rp 2.150.314.033,00.

## 2. Belanja - LRA

Realisasi belanja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA. 2023 adalah sebesar Rp 4.773.980.765,00 atau 96,10% dari anggaran sebesar Rp 4.967.700.000,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA.2023 tersaji sebagai berikut:

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
<b>BELANJA</b>				
<b>Belanja Operasi</b>				
1. Belanja Pegawai	2.965.950.000,00	2.798.820.446,00	94,37	3.181.796.457,00
2. Belanja Barang dan Jasa	1.984.572.000,00	1.958.107.619,00	98,67	2.295.420.006,00
3. Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Belanja bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>4.950.522.000,00</b>	<b>4.756.928.065,00</b>	<b>96,09</b>	<b>5.477.216.463,00</b>
<b>Belanja Modal</b>				
1. Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.178.000,00	17.052.700,00	99,27	0,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Belanja Modal aset tak berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.967.700.000,00</b>	<b>4.773.980.765,00</b>	<b>96,10</b>	<b>5.477.216.463,00</b>



Berdasarkan tabel diatas perbandingan realisasi belanja TA 2023 dengan TA. 2022 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA. 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,30%.

Dengan rincian Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 2,29% dan Belanja Modal naik 99,27%.

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp 4.756.928.065,00 mencapai 96,09% dari anggaran sebesar Rp 4.950.522.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi 2022 yang sebesar Rp 5.477.216.463,00. Mengalami kenaikan sebesar 2,29%.

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun rincian realisasi atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal TA. 2023 dan 2022 tersaji sebagai berikut :

Adapun rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

Belanja Operasi	2023		(% )	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>2.965.950.000,00</b>	<b>2.798.820.446,00</b>	<b>94,37</b>	<b>3.181.796.457,00</b>
a. Gaji dan Tunjangan ASN	1.663.666.000,00	1.540.986.530,00	92,63	1.761.109.002,00
b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.220.031.000,00	1.192.997.335,00	97,79	1.335.184.820,00
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	77.924.000,00	60.726.429,00	77,93	81.753.635,00
d. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	4.329.000,00	4.110.152,00	94,95	3.749.000,00
e. Insentif Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 .Belanja barang dan Jasa</b>	<b>1.984.572.000,00</b>	<b>1.958.107.619,00</b>	<b>98,67</b>	<b>2.295.420.006,00</b>
a. Belanja Barang Pakai Habis	681.846.000,00	679.473.512,00	99,66	1.019.868.891,00
b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Belanja Jasa Kantor	650.367.000,00	632.972.818,00	97,33	695.287.463,00
d. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	2.880.000,00	1.930.967,00	67,05	1.925.024,00
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.889.000,00	13.800.000,00	99,36	2.500.000,00
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00

i. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	55.000.00,00	50.200.000,00	91,28	52.880.000,00
j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
k. Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00
m. Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
n. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
o. Belanja Perjalanan Dinas	198.375.000,00	198.190.378,00	99,31	215.458.828,00
p. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126.585.000,00	126.238.000,00	99,91	66.500.000,00
q. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.100.000,00	66.085.344,00	99,98	88.999.800,00
r. Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	189.530.000,00	189.216.600,00	99,84	152.000.000,00
s. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
t. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
u. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
v. Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
w. Biaya Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
x. Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
y. Belanja Barang Dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
z. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00	00,00
<b>3. Belanja Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Belanja Bantuan sosial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Belanja Operasi</b>	<b>4.950.522.000,00</b>	<b>4.756.928.065</b>	<b>96,09</b>	<b>5.477.216.463,00</b>

## b) Belanja Modal

Belanja Modal	2023		Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	17.178.000,00	17.052.700,00	99,27
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.178.000,00</b>	<b>17.052.700,00</b>	<b>99,27</b>

Tahun anggaran 2023 menganggarkan belanja modal peralatan dan mesin yaitu belanja modal alat studio berupa drone sebesar Rp. 15.000.000,00 dan belanja modal peralatan personal computer berupa hardisk eksternal dan peralatan personal computer lainnya sebesar Rp. 2.052.700,00.

Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	2023		Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
.Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	17.178.000,00	17.052.700,00	99,27
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.178.000,00</b>	<b>17.052.700,00</b>	<b>99,27</b>

## B. Laporan Operasional

### 1. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.543.956.730,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapata Retribusi Daerah – LO	1.543.956.730,00	1.808.616.000,00
2	Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0,00	341.698.033,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.543.956.730,00</b>	<b>2.150.314.033,00</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2023 turun sebesar Rp 606.357.303,00 atau sebesar 28,20 % dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Beban - LO

Realisasi Beban OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada TA.2023 adalah sebesar Rp 4.747.617.953,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Rincian Beban TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan %
BEBAN			
Beban Operasi	4.747.617.953,00	5.772.977.847,00	(17,76)
Beban Transfer	-	-	
Beban Luar Biasa	-	-	
<b>Total Beban</b>	<b>4.747.617.953,00</b>	<b>5.772.977.847,00</b>	<b>(17,76)</b>

a. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp 4.747.617.953,00 terdiri dari:

**Realisasi Beban Operasi**

No	Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	2.786.843.825,00	3.166.879.121,00	(12,00)
2	Beban Persediaan	680.195.012,00	1.037.590.741,00	(34,44)
3	Beban Jasa	890.065.394,00	902.814.030,00	(1,41)
4	Beban Pemeliharaan	192.323.344,00	108.999.800,00	76,44
5	Beban Perjalanan Dinas	198.190.378,00	215.458.828,00	(8,01)
6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	341.235.327,00	(100,00)
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			0,00
9	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi			0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.747.617.953,00</b>	<b>5.772.977.847,00</b>	<b>(17,76)</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi beban LO tahun 2023 turun sebesar Rp 1.025.359.894,00 atau sebesar (17,76)% dibandingkan tahun sebelumnya.

- a. **Beban Pegawai**  
Realisasi Beban Pegawai OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.786.843.825,00.
- b. **Beban Persediaan**  
Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 680.195.012,00
- c. **Beban Jasa**  
Realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 890.065.394,00.
- d. **Beban Pemeliharaan**  
Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 192.323.344,00
- e. **Beban Perjalanan Dinas**  
Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 198.190.378,00
- f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 0,00 merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**

NO	Jenis Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Alat- alat bantu	0,00	0,00
2.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00
3.	Beban Penyusutan Alat Ukur	0,00	0,00
4.	Beban Penyusutan Alat Kantor	0,00	0,00
5.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00
6.	Beban Penyusutan Komputer	0,00	0,00
7.	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Raat Pejabat	0,00	0,00
8.	Beban Penyusutan Alat Studio	0,00	0,00
9.	Beban Penyusutan Unit- unit Laboratorium	0,00	0,00
10.	Beban Penyusutan ALat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	0,00	0,00
11.	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00
12.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00
13.	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00
14.	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>,00</b>

## g. Surplus/defisit –LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2023 sebesar (Rp.3.203.661.223,00) atau naik sebesar 13,08% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar (Rp.3.622.663.814,00)

## C. Neraca

## 1. Aset

## a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.354.000,00 dan Rp 3.075.500,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada OPD Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel**  
**Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Aset Lancar	TA 2023	TA 2022
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	0.00
4	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
5	Piutang Pendapatan	0.00	0.00
6	Piutang Lainnya	0.00	0.00
7	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
8	Beban dibayar di muka	0.00	0.00
9	Persediaan	2.354.000,00	3.075.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.354.000,00</b>	<b>3.075.500,00</b>

## 1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp.0,00 .

## Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	0,00	-

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa pelayanan dan pendapatan lain yang sah.

3) Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00. Saldo Kas Lainnya disajikan sebagai berikut:

No	Jenis Kas Lainnya	Nilai (Rp)	Ket
1.	Kas di BLUD	0,00	Dana BLUD
2.	Kas di Bendahara BOS	0,00	Dana BOS
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	

4) Piutang

a. Piutang Pendapatan

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Saldo Piutang sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

**Rincian Piutang  
per 31 Desember 2023**

Piutang Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Audited) (Rp)
1) Piutang Pendapatan	0,00	0,00
a. Piutang Pajak	0,00	0,00
b. Piutang Retribusi	0,00	0,00
c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
d. Piutang Lain-Lain PAD yang sah	0,00	0,00
2) Piutang Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.354.000,00 dan Rp. 3.075.500,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp. 2.354.000,00 merupakan saldo persediaan atas bahan habis pakai yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

No	Persediaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Audited) (Rp)
1.	Bahan Habis Pakai	2.354.000,00	3.075.500,00
2.	Bahan/Material	0,00	0,00
3.	Barang Lainnya	0,00	0,00
4.			
<b>Jumlah</b>		<b>2.354.000,00</b>	<b>3.075.500,00</b>

## b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp.7.151.453.505,00 dan Rp. 7.134.400.805,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap OPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut:

## Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2023	T.A. 2022
1	Tanah	2.988.535.000,00	2.988.535.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.951.477.924,00	3.934.425.224,00
3	Gedung dan Bangunan	3.930.090.417,00	3.930.090.417,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.626.000,00	66.626.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.786.775.836,00)	(3.786.775.836,00)
<b>Jumlah</b>		<b>7.151.453.505,00</b>	<b>7.134.400.805,00</b>



1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki OPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 2.988.535.000,00 dan Rp. 2.988.535.000,00

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.988.535.000,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	0,00
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00
Koreksi tambah Aset		
Total Tambah		
Mutasi kurang:	Rp	0,00
Mutasi ke SKPD lain	Rp	0,00
penghapusan	Rp	0,00
Total kurang		
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>2.988.535.000,00</b>

Tanah yang tercatat di Neraca OPD Dinas DPMPTSP terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Tanah OPD DPMPTSP	Rp 2.988.535.000	Rp -	Rp -	Rp 2.988.535.000
2	Tanah .....	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Tanah .....	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	Tanah .....	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.988.535.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 2.988.535.000</b>

Adapun Tanah OPD DPMPTSP senilai Rp 2.988.535.000,00 terletak pada Jl. Indrakila No. 10 Kebumen.

No	Lokasi	Kecamatan	Tahun	Luas (m2)	Nilai Perolehan
1	Jl. Indrakila No. 10	Kebumen			2.988.535.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>2.988.535.000,00</b>

2) Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 3.951.477.924,00 dan Rp 3.934.425.224,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 3.934.425.224,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp 17.052.700,00
Mutasi dari SKPD lain	Rp 0,00
Reklas/koreksi tambah Aset	Rp 0,00
Total tambah	Rp 0,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan	Rp 0,00
Rusak Berat	Rp 0,00
Mutasi ke SKPD lain	Rp 0,00
Koreksi	Rp 0,00
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp 0,00
Total kurang	Rp 0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 3.951.477.924,00</b>

Jumlah akhir aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 3.951.477.924,00 sebagaimana mutasi berikut:

No	Lokasi Peralatan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	DPMPTSP	3.934.425.224	17.052.700	-	3.951.477.924
	<b>Jumlah</b>	<b>3.934.425.224</b>	<b>17.052.700</b>	<b>-</b>	<b>3.951.477.924</b>

### 3) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 3.930.090.417,00 dan Rp. 3.930.090.417,00

Saldo per 31 Desember 2022	Rp. 3.930.090.417,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	
Mutasi dari SKPD lain	
Koreksi / Reklas tambah Aset	Rp. ,00
Total Tambah	Rp. ,00
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	
Rusak Berat	
Mutasi ke SKPD Lain	Rp. ,00
Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)	
Total Kurang	
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp. 3.930.090.417,00</b>

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 3.930.090.417,00 terdiri dari :

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Gedung Kantor	Rp 3.930.090.417	Rp -	Rp -	Rp 3.930.090.417
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.930.090.417</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 3.930.090.417</b>

Nilai bangunan gedung tersebut belum dikurangi beban penyusutan gedung karena masih dalam proses.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 66.626.000,00 dan Rp 66.626.000,00.

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 66.626.000, 00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp -
Mutasi dari SKPD LAin	Rp -
Koreksi Tambah/reklas aset	Rp -
Total Tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusa Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi/reklas aset	Rp -
Total Kurang	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 66.626.000, 00</b>

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 1.500.000,00 dan Rp. 1.500.000,00.

Saldo per 31 Desember 2022	Rp -
Mutasi tambah:	Rp 1.500.000,00
Belanja Modal	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi Tambah /reklas aset	Rp -
Total Tambah	
Mutasi kurang:	Rp -
Penghapusan Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD	Rp -
Koreksi/reklas aset	Rp -
Total Kurang	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp 1.500.000,00</b>

6) Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp (3.786.775.836,00) dan Rp (3.786.775.836,00). OPD Dinas Penanaman Modal Dan PTSP tahun 2023 merupakan tahun ke-7 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke accrual basis, sehingga tahun 2023 merupakan tahun ke-7 dalam melakukan penyusutan, namun masih dalam proses perhitungan.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam hal OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai SKPD, tidak ada Dana Cadangan pada OPD Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2023.

d. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

1) Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian Software	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghapusan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

## 2) Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00. Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
Mutasi tambah:		
Belanja Modal 2021	Rp	-
Mutasi dari SKPD Lain	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Reklas	Rp	-
Total Tambah	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghapusan Aset .....	Rp	-
Rusak Berat	Rp	0,00
Mutasi ke SKPD lain	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Total Kurang		
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

## 2. Kewajiban

## a) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp 104.680.065,00 dan Rp 114.711.677,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2	Pendapatan diterima Dimuka	0,00	0,00
3	Utang Belanja	104.680.065,00	114.711.677,00
4	R/K PPKD	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>104.680.065,00</b>	<b>131.407.470,00</b>

## 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Contoh Utang Perhitungan Pihak Ketiga diantaranya adalah potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2023 dan di DPMPTSP nilainya adalah Rp. 0,00.

2) Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2023 diterima SKPD sebagai berikut:

No.	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	DPMPTSP	0,00	-
	Jumlah	0,00	-

**3. Ekuitas**

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 7.022.764.628,00 dan Rp 7.022.764.628,00.

**D. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp.7.022.764.628,00 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2022 sebagai berikut:

Ekuitas Dana Lancar sebesar	Rp	.....,00
Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp	.....,00
Ekuitas Dana Cadangan sebesar	<u>Rp</u>	<u>.....,00</u>
Jumlah	Rp	7.022.764.628,00

2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Persediaan sebesar	Rp.....,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar	Rp.....,00
- Penilaian Kembali Aset Tetap sebesar	Rp.....,00

3. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir senilai Rp 7.049.127.440,00.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **A. Penjelasan Umum**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen beralamat di Jl. Indrakila No. 10 Kebumen. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan;
- b. Memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi calon investor;
- c. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan izin usahanya dan memenuhi syarat Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kebumen sudah menggunakan Online Single Submission (OSS) dan Gerai Layanan Investasi (Galaksi) sebagai pendamping Sistem Informasi Perizinan (SIPERI). Sejak tahun 2022 terkait dengan pelayanan publik dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) dengan nilai A sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima dan penilaian atas pembangunan zona integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia sebagai Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 dengan kualitas tertinggi yaitu 96,08 dengan indikator zona hijau. Penilaian ini untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan, pengelolaan, dan pengaduan. Dengan perolehan penghargaan ini, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan guna meningkatkan kepuasan masyarakat dan realisasi investasi di Kebumen. Untuk Penanaman Modal dari target investasi tahun 2023 sebesar Rp. 401.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 628.230.300.500,00 (156,67%). Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kebumen juga mendapatkan Predikat Terbaik I pada Penghargaan OPD Kabupaten Kebumen dengan Pengelolaan Anggaran Terbaik Tahun 2023. Dengan diterimanya penghargaan ini, dijadikan sebagai pengingat untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan anggaran yang tersedia dengan tepat guna.



**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun anggaran 2023 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas OPD sebagai sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2023  
PENGGUNA ANGGARAN



**Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196410151989032006**